

## **PREDIKSI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA**

**Steven Thomas**

*E-mail:* steven\_thomas@yahoo.com

### **ABSTRACT**

Objective is to create a predictive model of the financial soundness of local government and specify the variables that were able to predict differences in the financial soundness of local governments in the province of North Maluku. The method used is the discriminant analysis. The categories of the financial soundness of local government consists of governments that are healthy and unhealthy and variables suspected to affect the financial soundness of local government is liquidity (Qr), leverage (Lr), fiscal decentralization (DOF), fiscal dependency (Kf), the general allocation fund ( RDAU), economic growth (Pe), income per capita (WELFI), poverty (POVEI) and human development (IPM). Population and sample are districts/municipalities in the province of North Maluku. Data used is secondary data in the form of panel data (pooling data) for the 2009-2014 period, which was collected from the balance sheet, budget realization reports, social and economic data in the publication of directories Director General of Fiscal and Regional Finances (KEMENKEU), BAPPENAS, BPS, and the relevant agencies. There are seven variables that significantly affect the financial soundness of governments that fiscal decentralization, fiscal dependence, general allocation fund, economic growth, per capita income, poverty, and human development.

**Keywords:** government financial performance, indicator economic performance

**JEL Classification:** H75, O12

### **PENDAHULUAN**

Babak baru bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001, telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya. termasuk didalamnya adalah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat daerah setempat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar-daerah dan mendorong timbulnya inovasi, pemerintah daerah (selanjutnya disingkat pemda) diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002: 1).

Pemda beserta DPRD mempunyai kekuasaan dalam menyusun kebijakan-kebijakan untuk melancarkan interaksi antarpelaku ekonomi daerah. Hakekat pembangunan daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemda dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan otonomi

daerah ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kinerja Pemerintah Daerah (Mahmudi, 2015). Walaupun kinerja pemerintah daerah bukanlah faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah namun perlu mendapat perhatian dan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, secara simultan juga harus dilakukan peningkatan atas faktor-faktor lainnya. Riyadi (2003) mengemukakan bahwa antara implementasi kebijakan otonomi daerah dan kinerja pemerintah daerah dapat ditarik hubungan sebab akibat yang cukup signifikan. Antara kedua kondisi tersebut saling mempengaruhi, selain implementasi otonomi daerah dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya kinerja pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh implementasi kebijakan otonomi daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pembangunan yang menekankan pentingnya pertumbuhan banyak dipersoalkan, karena disadari bahwa tolok ukur kinerja daerah yang murni bersifat ekonomi harus pula didukung oleh tolok ukur yang bersifat nonekonomi. Sen dalam Presman, 2000: 272, *World Bank* (2000), Sukirno, (2006), Kuncoro (2015: 218) selanjutnya menyatakan bahwa “Paradigma pembangunan daerah pun kemudian mulai bergeser ke arah pembangunan yang seimbang. Paradigma ini mengungkap kembali pentingnya ‘*The second fundamental theory of welfare economics*’ yaitu keseimbangan pembangunan ekonomi dan nonekonomi. Strategi pembangunan kini lebih memberikan penekanan utama kepada faktor manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan. Hal terpenting di sini adalah bagaimana memperluas pilihan-pilihan penduduk untuk hidup lebih panjang, lebih terdidik dan lebih mendapatkan akses terhadap sumberdaya untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Dengan demikian, indikator pembangunan atau kinerja suatu daerah juga mengalami perubahan. Disamping pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kinerja daerah juga dinilai dari berbagai indikator kemajuan makro sosial.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kinerja daerah terukur melalui kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kaho (1997) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah melalui *self supporting* dalam bidang keuangan.

Hal ini berarti bahwa keuangan juga termasuk faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain di luar PAD dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Maluku utara selain memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki banyak potensi destinasi wisata yang diminati pelancong domestik dan mancanegara. Pulau Morotai misalnya merupakan salah satu kawasan perbatasan di Indonesia yang memiliki nilai historis sebagai pangkalan udara sekutu pada masa perang dunia II dahulu. Selain itu, kabupaten ini memiliki potensi kelautan yang besar dan berpotensi menjadi pintu gerbang Indonesia menuju Asia Pasifik. Oleh karenanya, melalui PP No. 50 Tahun 2014, pulau Morotai ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang terdiri atas zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, dan zona pariwisata.

Berdasar data dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, untuk untuk mengembangkan KEK Morotai, setidaknya diperlukan investasi senilai Rp. 6,8 triliun. Namun demikian, potensi nilai investasi yang dapat diperoleh dari KEK Morotai apabila telah beroperasi tidak kurang dari Rp. 67,87 triliun hingga tahun 2025. Tentu dengan adanya potensi ekonomi yang demikian besar, Morotai berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di provinsi Maluku Utara, dan diharapkan mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi peningkatan PDRB kabupaten/kota lain di provinsi Maluku Utara.

Hingga saat ini Pangsa PDRB provinsi Maluku Utara, masih didominasi oleh kota Ternate (Daerah Induk) yang menjadi lokasi pusat pembangunan, pusat ekonomi, dan pusat perdagangan dan jasa. Harapannya adalah pemerataan pembangunan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru perlu dipercepat, tanpa meninggalkan pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada. kabupaten Halmahera Utara dan kabupaten Halmahera Selatan (DOB), dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, dan pertambangan yang dimilikinya, memiliki potensi untuk berkembang bersama wilayah-wilayah lain yang juga tak kalah besar potensinya. Pengembangan sepuluh kawasan

strategis yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi Maluku Utara, diharapkan menjadi pedoman umum pengembangan kewilayahan berbasis keunggulan lokal setempat. Kawasan yang terintegrasi dan saling mendukung ditujukan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Penelitian ini pada dasarnya akan melihat variabel-variabel apa saja yang mampu membedakan kinerja/kesehatan keuangan pemda kabupaten/kota di Maluku Utara setelah memasuki era otonomi, dengan penggunaan indikator-indikator mikro dan makro (sosial-ekonomi) apakah mengalami pergeseran yang nyata dan berarti, terlebih pada keeratan hubungan kedua aspek tersebut.

### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan/organisasi, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Einsenhart (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko; (b) asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen; (c) Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan (1995) adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO sebagai agen

mereka.

Dalam entitas publik, teori keagenan secara sadar ataupun tidak, telah diterapkan di pemerintahan Indonesia. Masyarakat, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen, karena Pemda baik secara langsung maupun tidak langsung akan bertanggungjawab kepada masyarakat dan DPRD sebagai konstituennya dan juga kepada pemerintah pusat. Agen akan berusaha menyakinkan prinsipal dengan cara memandirikan masyarakatnya dikarenakan agen tertarik dengan kesejahteraan dan juga sesuai amanat, tugas, dan tanggung jawab yang melekat pada agen adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

**Hubungan *Liquidity* dengan Kontribusi PAD Pemda**  
Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemda sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen pemda dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas. Rasio likuiditas yang jelek dalam jangka panjang juga akan mempengaruhi solvabilitas pemda.

Rasio cepat (*quick ratio*) ini merupakan salah satu ukuran likuiditas yang terbaik, lebih menarik dibandingkan rasio lancar (*current ratio*). Rasio cepat mengindikasikan apakah pemda mampu membayar seluruh utang jangka pendeknya dengan cepat atau tidak. Rasio cepat (*quick ratio*) atau dikenal juga dengan 'tes asam (*acid test*)' membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Dalam hal ini persediaan dianggap kurang cepat menghasilkan kas, karena pada umumnya memerlukan dua tahap lagi untuk mengubahnya menjadi kas. Pertama, menjual dan menjadi piutang. Kedua, menagih piutang tersebut sehingga menjadi kas. Sementara, aktiva lancar setara kas lainnya hanya memerlukan satu langkah untuk menjadi kas, misalnya piutang dan surat berharga. Semakin tinggi *quick ratio* maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemda. Ketentuan umumnya yang dianggap baik untuk *quick ratio* adalah 1 : 1, sehingga hipotesis penelitian yang dibentuk adalah:

**H1:** *Liquidity* berpengaruh positif terhadap kontribusi PAD pemda.

### **Hubungan *Leverage* dengan Kontribusi PAD Pemda**

Utang bagi pemda memiliki beberapa manfaat tetapi juga mengandung risiko yang merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Manfaat utang bagi pemda antara lain dapat digunakan untuk memperbaiki struktur neraca, memperbaiki kesinambungan fiskal, serta untuk membiayai investasi pembangunan yang membutuhkan dana besar sehingga akselerasi pembangunan bisa dicapai. Namun dari beberapa manfaat, utang juga mengandung risiko. Utang yang terlalu besar (*over-leveraged*) justru dapat melemahkan struktur fiskal dan rentan terhadap krisis keuangan. Kegagalan membayar utang dapat menimbulkan implikasi luas bagi pemda, misalnya reputasi pemda menjadi turun, risiko ekonomi meningkat sehingga investor enggan untuk berinvestasi, serta mengganggu pertumbuhan ekonomi.

*Leverage ratio* mengindikasikan seberapa besar pemda terbebani oleh utang. Informasi ini penting untuk mengetahui struktur pembiayaan pemda. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi memberi sinyal bahwa pemda mungkin sudah kelebihan utang (*over-leveraged*) dan harus segera mencari solusi untuk segera mengurangi utangnya. rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemda dalam membayar utangnya. Rasio utang (*leverage ratio*) atau yang sering disebut *debt to equity ratio* (DER) diperoleh dari perbandingan utang terhadap ekuitas dana pemda, yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas pemda yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utangnya. Semakin besar leverage ratio maka semakin kecil jumlah ekuitas pemda yang dapat dijadikan jaminan utang atau dapat juga berarti risiko hutang pemda semakin besar. Ketentuan umumnya adalah bahwa debitur seharusnya memiliki leverage ratio kurang dari 0,5 atau optimal dengan perbandingan 1 : 2. Namun nilai ini dapat saja bervariasi tergantung pada entitas masing-masing, sehingga hipotesis penelitian yang dibentuk adalah:

**H2:** *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kontribusi PAD pemda.

Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DOF) dengan Kontribusi PAD Pemda

Mengukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR). Menurut Reksohadiprodjo

(2000) dalam Munir dkk (2004, h.106), DOF dapat diukur dengan perbandingan PAD terhadap TPD (total penerimaan daerah). Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi kemampuan pemda dalam penyelenggaraan otonomi (Balitbang Depdagri 1991: 14).

Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemda masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemda dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004: 21-22).

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD di suatu daerah menandakan daerah tersebut akan semakin mandiri dan mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah (Ismail, 2001).

Sejak tahun 1984 berbagai UU tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi PAD (Siahaan, 2005: 1-2). Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

**H3:** Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kontribusi PAD pemda.

**Hubungan Ketergantungan Fiskal dengan Kontribusi PAD Pemda**

Terdapat UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemda dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Ketiga Undang-Undang tersebut pada dasarnya dihubungkan dalam suatu prinsip dasar yang sering disebut sebagai *money follows function*. Dengan prinsip ini, fungsi yang telah diserahkan ke daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 di ikuti dengan pendanaan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi dimaksud. Namun perlu dipahami bahwa ketersediaan pendanaan selalu mempunyai kendala, karena pada dasarnya anggaran selalu terbatas. Oleh karena itu UU No. 33 tahun 2004 mengatur sumber-sumber pendanaan yang terbatas tersebut yang dapat digunakan oleh daerah, yaitu melalui pemanfaatan sumber pendapatan di daerah itu sendiri maupun melalui transfer ke daerah. Jika sumber penerimaan pokok yang berasal dari potensi daerah sendiri tidak mampu mencukupi belanja daerah maka transfer daerah yang meliputi dana perimbangan, dana otsus dan dana penyesuaian dapat digunakan untuk belanja daerah.

Implementasi transformasi transfer ke daerah belum sepenuhnya membangkitkan kemandirian daerah. Karakteristik daerah, kondisi geografis, dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor fundamental. Beberapa daerah memiliki rasio kemandirian fiskal tinggi sedangkan sebagian besar lainnya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dan dana penyesuaian mengindikasikan PAD belum memiliki peran dominan sebagai lokomotif pembangunan di daerah.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan strategik dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan

APBD (Puspitasari, 2013: 6). Hipotesis penelitian yang dibentuk adalah:

**H4:** Ketergantungan fiskal berpengaruh negatif terhadap kontribusi PAD pemda.

**Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Kontribusi PAD Pemda**

Dana alokasi umum (DAU) pada kelompok Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan dana DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana perimbangan yang berasal dari DAU merupakan transfer Pemerintah Pusat untuk menutupi kebutuhan fiskal daerah yang sepenuhnya belum mampu dibiayai oleh pendapatan asli daerah (PAD). Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat menjadi sumber pendanaan utama untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah (Adam *et al.*, 2013). Bahkan DAU jumlahnya paling signifikan untuk hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia (Brodjonegoro, 2001). Fenomena yang sama terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, Pemerintah Daerah di NTB menempatkan DAU sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar dengan prosentase mencapai 59%, kemudian PAD sebesar 13%, lain-lain pendapatan daerah yang sah 10%, DBH 8% dan DAK 7%.

PAD yang dikumpulkan Pemda dapat mempengaruhi realisasi belanja modal (Tuasikal, 2008; Subowo dan Wati, 2010; Kurniawan, 2013; Sholikhah dan Wahyudin, 2014; Mayasari *et al.*, 2014). Sementara studi Oktora dan Pontoh (2013) menemukan korelasi yang rendah antara PAD dan belanja modal akibat kurangnya proporsi PAD dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, studi Abdulah dan Halim (2006), Paujiah (2010), dan Wandira (2013) menemukan PAD tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah.

Pendapatan yang diperoleh Pemda yang berasal dari dana perimbangan dapat mempengaruhi belanja modal (Abdullah dan Halim, 2006; Subowo dan Wati, 2010). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan

pada pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dapat mempengaruhi jumlah belanja modal yang direalisasikan Pemda. Studi Oktora dan Pontoh (2013) melihat ada hubungan yang erat antara DAU yang merupakan salah satu komponen dana perimbangan dengan belanja modal. Namun studi Sholikhah dan Wahyudin (2014) menemukan DAU tidak mempengaruhi belanja modal. Hipotesis penelitian yang dapat dibentuk dalam penelitian ini adalah:

**H5:** DAU berpengaruh negatif terhadap kontribusi PAD pemda.

#### **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Kontribusi PAD Pemda**

Dua dekade terakhir, China menjadi fenomena pertumbuhan ekonomi dunia. Perkonomian China mampu tumbuh tinggi, bahkan pada periode 2000-2010 mampu tumbuh rata-rata 10,5% (*double digit*) dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2007 yang mencapai 14,2%. Bahkan secara ukuran pada tahun 2014 besaran PDB China sudah setara dengan PDB USA (IMF dari Economic.com: 2014).

Bagi Indonesia, penurunan harga komoditas ekspor sangat mempengaruhi ekspor Indonesia. Dan jelas ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan segala aktivitas derivatifnya, seperti sektor usaha besar maupun UKM yang berorientasi ekspor, ketenagakerjaan, dan penghasilan masyarakat. Dari sisi fiskal penurunan harga komoditas akan mempengaruhi penerimaan negara. Baik penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA) migas maupun nonmigas dan penerimaan perpajakan dari perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan. Dampak ini terasa sangat pada periode 2015. Penerimaan SDA dalam tahun 2014 mencapai Rp.242,9 triliun, pada APBN-P 2015 hanya ditargetkan sebesar Rp. 118,9 triliun. Penurunan di sisi penerimaan akan berimplikasi pada kemampuan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendanai belanja programnya. Lebih lanjut, jika tidak terkelola dengan baik dalam jangka panjang, hal ini akan berakibat pada rendahnya ketercapaian target-target pembangunan. Hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah:

**H6:** Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kontribusi PAD pemda.

#### **Hubungan Pendapatan Per Kapita Penduduk den-**

#### **gan Kontribusi PAD Pemda**

Menurut Todaro dan S.C. Smith (2006: 22), Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi 1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, 2) peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan, dan 3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Menurut Sudarsono (1982: 357), kesejahteraan masyarakat adalah kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut. Suryanto *et.al* (2005: 10) dan Soesilowati *et.al.* (2000: 6), masyarakat sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau dan berkualitas atau dengan kata lain, sebuah kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Standar kehidupan masyarakat yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan pendapatan nasional atau *gross domestic product* atau produk domestik bruto per kapita (GDP per kapita) sebagai indikator pencerminan kemampuan penduduk dalam wilayah/negara tertentu dalam menghasilkan pendapatan. Indikator PDB per kapita menunjukkan bahwa semakin besar PDB per kapita suatu negara/wilayah, semakin meningkat kesejahteraan masyarakat di negara/wilayah tersebut. Hipotesis yang dirumuskan adalah:

**H7:** Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap kontribusi PAD pemda.

#### **Hubungan Kemiskinan dengan Kontribusi PAD Pemda**

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman dan nyaman, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup

(sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau, hak rakyat untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan kesehatan, hak rakyat untuk memperoleh keadilan, hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, hak rakyat untuk berinovasi, hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, sehingga cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, serta diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan, dan tidak temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Berdasarkan dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Berdasarkan dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Berdasarkan dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi, dan kurangnya ketrampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi; dengan kata lain mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin. Sehingga dapat terbentuk ketahanan potensi-potensi daerah yang secara tak langsung dapat menopang stabilitas fiskal dan moneter nasional secara agregat didalam mengantisipasi permasalahan krisis global yang penuh dengan ketidakpastian. Maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah:

**H8:** Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kontribusi PAD pemda.

### **Hubungan Pembangunan Manusia dengan Kontribusi PAD Pemda**

Sen (1982) dalam Pressman (2000: 273) kesejahteraan masyarakat tergantung pada hal-hal yang dapat masyarakat lakukan dengan baik. Kesejahteraan masyarakat akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya. Kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkannya, tetapi karena dengan membaca akan membentuk kepribadian. Makan penting bukan karena kepuasan mengkonsumsi makanan, tetapi karena makanan penting untuk dapat bertahan hidup dan menjaga kesehatan. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan individu, tetapi karena menghargai sistem politik (berdemokrasi). Kesejahteraan manusia adalah jumlah pilihan yang dipunyai orang dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut.

Menurut BPS (2009: 3-5), IPM sebagai manifestasi pembangunan manusia dapat difafsirkan sebagai keberhasilan meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan. IPM yang memasukkan indeks kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak dalam perhitungannya sangat tepat apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena ketiga faktor tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Dalam kondisi persaingan antarnegara dan antarbangsa yang sedemikian ketatnya, maka ketiga faktor diatas sebagai pembentuk kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa menjadi unsur penting dalam meningkatkan potensi negara Indonesia. Semakin tinggi angka IPM maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terjaga relatif meningkat, berimplikasi ke kesadaran masyarakat akan kontribusinya dalam pembangunan memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sebagai warga negara. sehingga hipotesis penelitian yang dibentuk adalah:

**H9:** Pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap kontribusi PAD pemda.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder selama periode tahun 2009-2014. Penggunaan data sekunder dengan periode waktu studi yang relatif yaitu 6 (enam) tahun menjadi pertimbangan dalam ketersediaan data dan keterbatasan dari berbagai institusi. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam pene-

litian ini adalah melalui studi pustaka yang merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi yang masih relevan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk data mentah yang diolah untuk menghitung indeks dan data yang sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan dengan analisis diskriminan. Analisis diskriminan mensyaratkan data berdistribusi normal. Analisis diskriminan dalam penelitian ini merupakan suatu analisis multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesehatan keuangan pemda ke dalam dua group: pemda sehat (kinerja baik) diberi angka 2 dan pemda tidak sehat (kinerja tidak memuaskan) diberi angka 1 berdasarkan sebelas prediktor variabel yang terdiri dari: *liquidity*, *leverage*, derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan fiskal, DAU, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Model analisis diskriminan yang digunakan dalam penelitian ini disebut *Two Group Discriminant Analysis*, karena tingkat kesehatan pemda hanya diklasifikasikan ke dalam dua group. Penggolongan

data menggunakan bantuan program SPSS 22,0 *for windows*.

**HASIL PENELITIAN**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas sebaran data dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov test dengan kriteria jika signifikan *P-value* > 0,05 maka variabel yang bersangkutan dinyatakan memiliki sebaran data yang normal. Hasil pengujian dirangkum dalam Tabel 1 berikut ini:

Berdasar Tabel 1, nilai *P-value* > 0,05 untuk semua variabel, sehingga semua variabel dinyatakan memiliki distribusi (sebaran) normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah korelasi antarvariabel independen melebihi batas yang diijinkan yaitu 0,90 (Ghozali, 2016: 103). Hasil uji multikolinearitas dirangkum pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas Sebaran Data**

No	Variabel	Nilai Z K-S	P-value	Sebaran
1.	<i>Liquidity</i> (LogQr)	0,566	0,906	Normal
2.	<i>Leverage</i> (Lr)	1,229	0,094	Normal
3.	Desentralisasi Fiskal (DOF)	1,271	0,100	Normal
4.	Ketergantungan Fiskal (Kf)	1,214	0,105	Normal
5.	DAU (RDAU)	0,825	0,504	Normal
6.	Pertumbuhan Ekonomi (Pe)	1,285	0,080	Normal
7.	Pendapatan per kapita (LogWELFI)	0,816	0,519	Normal
8.	Kemiskinan (POVEI)	1,256	0,085	Normal
9.	Pembangunan Manusia (IPM)	1,250	0,102	Normal

**Tabel 2**  
**Ikhtisar Hasil Uji Multikolinearitas – IPM**

No	Korelasi antarvariabel	Nilai R	Kriteria	IPM
1.	IPM – LogQr	0,203	≤ 0,90	Tidak ada masalah Multikolinearitas
2.	IPM – Lr	-0,256	≤ 0,90	Tidak ada masalah Multikolinearitas
3.	IPM – DOF	0,108	≤ 0,90	Tidak ada masalah Multikolinearitas
4.	IPM – Kf	-0,148	≤ 0,90	Tidak ada masalah Multikolinearitas
5.	IPM – RDAU	0,036	≤ 0,90	Tidak ada masalah Multikolinearitas
6.	IPM – Pe	0,231	≤ 0,90	Tidak ada masalah Multikolinearitas
7.	IPM – LogWELFI	0,352	≤ 0,90	Tidak ada masalah Multikolinearitas
8.	IPM – POVEI	-0,611	≤ 0,90	Tidak ada masalah Multikolinearitas

**Analisis Diskriminan**

Tabel di bawah ini adalah hasil pengujian untuk setiap variabel independen yang ada. Keputusan bisa diambil adalah sebagai berikut:

Jika signifikansi > 0,05, maka tidak ada perbedaan dalam kelompok

Jika signifikansi < 0,05, maka ada perbedaan dalam kelompok

Berdasar hasil pengujian pada Tabel 3, maka: Hasil pengujian terhadap variabel *liquidity* (LogQr) menghasilkan F-hitung sebesar 1,498 dengan signifikansi adalah 0,227 > 0,05. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan *liquidity* yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan *liquidity* tidak berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

Hasil pengujian terhadap variabel *leverage* (Lr) menghasilkan F-hitung sebesar 3,203 dengan signifikansi adalah 0,080 > 0,05. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan *leverage* yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

Hasil pengujian terhadap variabel desentralisasi fiskal (DOF) menghasilkan F-hitung sebesar 19,280 dengan signifikansi adalah 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan desentralisasi fiskal (DOF) yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan desentralisasi fiskal (DOF) berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

Hasil pengujian terhadap variabel ketergantungan fiskal (Kf) menghasilkan F-hitung sebesar 20,672 dengan signifikansi adalah 0,000 < 0,05. Hasil ini

menunjukkan terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan ketergantungan fiskal (Kf) yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan ketergantungan fiskal (Kf) berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

Hasil pengujian terhadap variabel dana alokasi umum (RDAU) menghasilkan F-hitung sebesar 6,549 dengan signifikansi adalah 0,014 < 0,05. Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan dana alokasi umum (RDAU) yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan dana alokasi umum (RDAU) berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

Hasil pengujian terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Pe) menghasilkan F-hitung sebesar 4,468 dengan signifikansi adalah 0,040 < 0,05. Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan pertumbuhan ekonomi (Pe) yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi (Pe) berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

Hasil pengujian terhadap variabel pendapatan per kapita (WELFI) menghasilkan F-hitung sebesar 7,040 dengan signifikansi adalah 0,011 < 0,05. Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan pendapatan per kapita (WELFI) yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan pendapatan per kapita (WELFI) berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

Hasil pengujian terhadap variabel kemiskinan (POVEI) menghasilkan F-hitung sebesar 7,292 dengan signifikansi adalah 0,010 < 0,05. Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan kemiskinan (POVEI) yang

**Tabel 3**  
**Uji Signifikansi**

Variabel	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
LogQr	0,968	1,498	1	46	0,227
Leverage	0,935	3,203	1	46	0,080
DOF	0,705	19,280	1	46	0,000
KF	0,690	20,672	1	46	0,000
RDAU	0,875	6,549	1	46	0,014
Pe	0,911	4,468	1	46	0,040
LogWELFI	0,867	7,040	1	46	0,011
POVEI	0,863	7,292	1	46	0,010
IPM	0,634	26,561	1	46	0,000

dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan kemiskinan (POVEI) berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

Hasil pengujian terhadap variabel pembangunan manusia (IPM) menghasilkan F-hitung sebesar 26,561 dengan signifikansi adalah  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan antar dua kelompok PADS pemda terkait dengan pembangunan manusia (IPM) yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan dalam membedakan kelompok PADS pemda.

**Matrik Varian Kovarian Box’s M**

Hasil uji Box’s M menunjukkan bahwa nilai F sebesar 3,328 dan signifikan pada 0,000 dan probabilitas ini  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa matrik kovarian antar group memang berbeda, namun demikian analisis fungsi diskriminan masih dapat diteruskan (*robust*) walaupun asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi dengan syarat data tidak memiliki *outlier* (Ghozali, 2016: 296).

**Model Diskriminan**

Aspek multivariat dari model dapat dilihat pada fungsi diskriminan kanonikal (*canonical discriminant function*). Koefisien fungsi diskriminan yang belum distandarisasi digunakan untuk menghitung diskriminan *Z-score* yang dapat digunakan untuk klasifikasi.

**Tabel 4**  
**Fungsi Diskriminan**

Variabel	Fungsi 1	P-value
LogQr	-0,001	0,227
Leverage	-4,813	0,080
DOF	16,190	0,000
Kf	2,286	0,000
RDAU	-4,672	0,014
Pe	9,674	0,040
LogWELFI	0,382	0,011
POVEI	-2,213	0,010
IPM	18,282	0,000
(konstanta)	-14,491	

Jadi, model diskriminan yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

$$D = -14,491 + 16,190DOF + 2,286Kf - 4,672RDAU + 9,674Pe + 0,382LogWELFI - 2,213POVEI + 18,282IPM$$

Koefisien fungsi diskriminan kanonikal yang terstandarisasi (*standardized canonical discriminant function coefficients*) pada Tabel 5 digunakan untuk mengevaluasi relatif pentingnya setiap variabel diskriminan di dalam membentuk fungsi diskriminan sebagaimana koefisien beta pada regresi berganda.

**Tabel 5**  
**Koefisien Fungsi Diskriminan Terstandarisasi**

Variabel	Fungsi 1
LogQr	-0,001
Leverage	-0,136
DOF	0,716
Kf	0,093
RDAU	-0,337
Pe	0,254
LogWELFI	0,051
POVEI	-0,119
IPM	0,795

Kontribusi setiap variabel pada fungsi diskriminan bisa dilihat dari koefisien yang terstandarisasi, makin tinggi koefisien yang telah terstandarisasi, maka makin penting variabel tersebut terhadap variabel lainnya dan sebaliknya. Sehingga pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,795; derajat desentralisasi fiskal (DOF) sebesar 0,716; dana alokasi umum (RDAU) sebesar -0,337; pertumbuhan ekonomi (Pe) sebesar 0,254 menjadi empat variabel yang relatif lebih penting dibandingkan variabel lainnya.

Cara lain mengevaluasi kontribusi variabel terhadap skor diskriminan adalah menghitung korelasi Pearson antara nilai dari fungsi diskriminan dan nilai variabel diskriminan. Perhitungan korelasi ini disebut dengan *structure matrix* atau sering disebut dengan *loading*. Nilai dari *loading* ini terletak antara -1 dan +1. Semakin besar nilai absolut *loading* semakin erat hubungan antara variabel diskriminan dan fungsi diskriminan dan begitu pula sebaliknya. Pembangunan manusia 0,578, ketergantungan fiskal -0,510, dan derajat desentralisasi fiskal 0,493 mempunyai korelasi yang tinggi di banding *leverage* -0,201 dan *liquidity* 0,137.

**Tabel 6**  
**Struktur Matriks**

Variabel	Fungsi 1
IPM	0,578
Kf	-0,510
DOF	0,493
POVEI	-0,303
LogWELFI	0,298
RDAU	-0,287
Pe	0,237
Leverage	-0,201
LogQr	0,137

**Hasil Perhitungan Korelasi Kanonikal**

Nilai *eigen* menunjukkan berapa besar variasi pada variabel dependen dijelaskan oleh fungsi diskriminan. Berdasar Tabel 7, fungsi diskriminan sangat signifikan (0,000) dengan nilai korelasi kanonikal (CR) 0,796. Jika nilai korelasi kanonikal ini dikuadratkan ( $CR^2$ ) = 0,633 maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 63,3% variasi PADS pemda antara sehat dan tidak sehat dapat dijelaskan oleh variabel diskriminan.

Fungsi 1 dikriminan kanonikal digunakan dalam analisis

Uji semua variabel diskriminan secara serentak dilakukan melalui Wilk's Lambda (Tabel 8). Nilai Wilk's Lambda sebesar 0,367 maka besarnya nilai Chi

Squares adalah 41,639 sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dengan derajat kepercayaan  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti bahwa dua kelompok PADS pemda berbeda signifikan berdasarkan variabel diskriminan yang terbentuk.

Keakuratan analisis diskriminan bisa dilihat dengan cara mengevaluasi setiap observasi apakah sudah diklasifikasikan dengan benar dalam kelompok ataukah tidak. Tabel 9 menyajikan informasi yang berguna untuk perhitungan skor pembeda (*cutting score*).

**Tabel 9**  
**Nilai Rata-Rata (Centroid) Masing-Masing Kelompok**

Tingkat Kesehatan Keuangan Pemda	Fungsi 1
1	-0,997
2	1,661

Fungsi group *centroid* digunakan untuk menentukan *cutoff* pengelompokkan tingkat kesehatan keuangan pemda. Besarnya *cutoff* dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{Na Zb + Nb Za}{Na + Nb} = \frac{(30)(1,661) + (18)(-0,997)}{30 + 18} = 0,664$$

Berdasar hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai *cutoff* yang diperoleh adalah sebesar 0,664 sehingga pengelompokkan yang bisa dilakukan adalah

**Tabel 7**  
**Nilai Eigen**

Fungsi	Nilai Eigen	% Varians	Kumulatif	Korelasi Kanonikal
1	1.727 <sup>a</sup>	100,0	100,0	0,796

**Tabel 8**  
**Wilks' Lambda**

Uji Fungsi	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	0,367	41,639	9	0,000

**Tabel 10**  
**Hasil Klasifikasi**

Keterangan	Tingkat Kesehatan Keuangan Pemda	Prediksi Keanggotaan Group		Total
		1	2	
Keaslian	Jumlah	1	2	30
		2	4	18
Persentase		1	6,7	100,0
		2	22,2	100,0

sebagai berikut:

Apabila nilai  $Z$  score  $< 0,664$  maka masuk sebagai kelompok pemda dengan PADS tidak sehat.

Apabila nilai  $Z$  score  $> 0,664$  maka masuk sebagai kelompok pemda dengan PADS sehat.

Analisis terakhir adalah seberapa baik tingkat kebenaran klasifikasi dari model diskriminan yang terbentuk. Tabel 10 memberi informasi hasil kebenaran tingkat klasifikasi.

a. sebesar 87,5% pengelompokan aktual telah diklasifikasikan dengan benar.

Ketepatan klasifikasi aktual group terhadap prediksi group secara keseluruhan adalah sebesar 87,5% ( $42/48=0,875$ ). Aktual group yang masuk PADS 'sehat' sebanyak 18, ternyata yang sesungguhnya berdasarkan prediksi group hanya 14 ( $14/18=77,8\%$ ) atau terdapat 4 kesalahan klasifikasi. Begitu juga untuk aktual group yang masuk PADS 'tidak sehat' sebanyak 30, ternyata sesungguhnya hanya 28 ( $28/30=93,3\%$ ) atau terdapat 2 kesalahan klasifikasi. *Casewise Statistic* terlihat bahwa peneliti memprediksi 2 (sehat) ternyata sesungguhnya adalah 1 (tidak sehat) dan ini terjadi 4 kesalahan yaitu pada observasi 5, 28, 39, dan 47 yang masing-masing terdiri dari: kabupaten Halmahera Utara di tahun 2009, kabupaten Halmahera Selatan di tahun 2012; kota Tidore Kepulauan di tahun 2013 dan 2014. Berikutnya peneliti memprediksi 1 (tidak sehat) ternyata sesungguhnya adalah 2 (sehat) dan ini terjadi 2 kesalahan yaitu pada observasi 13 dan 30 (kabupaten Halmahera Utara di tahun 2010 dan Halmahera Timur di tahun 2012).

## PEMBAHASAN

*Liquidity* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 1,498 dengan  $P$ -value  $0,227 > \alpha$  5%. Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) derajat desentralisasi fiskal sebesar  $-0,001$  menunjukkan  $H_1$  tidak didukung, dapat disimpulkan bahwa *liquidity* tidak mampu mendiskriminasikan perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara. Hal ini menjelaskan bahwa 1) pemda kabupaten/kota sangat berhati-hati dalam mengadakan utang jangka pendek untuk membiayai belanja operasional rutinnya, 2) pemda berhati-hati menggunakan kas yang menganggur (*idle cash*) untuk melakukan investasi jangka pendek bagi produktivitas

operasionalnya, ataupun 3) pemda berhati-hati dalam mengadakan persediaan barang dalam jumlah yang relatif banyak. Sehingga secara umum, rata-rata *liquidity* yang dimiliki pemda kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara untuk periode 2009-2014 adalah relatif tidak berbeda.

Hasil pengujian hipotesis satu dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya, Kuncahyono (2015), Imawan & Wahyudin (2013), Dewi dan Murtini (2015), dan Pratiwi (2015) yang menyatakan bahwa ukuran/*wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Perbedaan hasil ini lebih disebabkan oleh ukuran variabel independen yang digunakan oleh penulis dengan peneliti terdahulu adalah berbeda. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan *liquidity* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PADS pemda.

*Leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 3,203 dengan  $P$ -value  $0,080 > \alpha$  5%. Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) derajat desentralisasi fiskal sebesar  $-4,813$  menunjukkan  $H_2$  tidak didukung, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak mampu mendiskriminasikan perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara. Ini menjelaskan bahwa rata-rata besarnya proporsi total utang terhadap ekuitas dana pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara relatif tidak berbeda. Selain itu, mengindikasikan pula bahwa masih kurangnya investasi jangka panjang yang dilakukan pemda kabupaten/kota sehingga *leverage* tidak mampu mendiskriminasikan perbedaan group yang ada.

Hasil pengujian hipotesis dua dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Imawan dan Wahyudi (2013) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 19,280 dengan  $P$ -value  $0,000 < \alpha$  5%. Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) derajat desentralisasi fiskal sebesar 16,190 menunjukkan  $H_3$  didukung, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal mampu mendiskriminasikan perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara dan memiliki arah yang berbanding lurus. Ini berarti bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, semakin

tinggi PADS. Selain itu hal ini juga mengindikasikan bahwa ada dinamika dan upaya dari masing-masing pemda untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri baik dengan meningkatkan penerimaan dari sumber PAD yang sudah ada maupun dengan pengalihan sumber-sumber PAD yang baru sesuai ketentuan perundangan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis tiga dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Bapenas (2013) yang menyatakan bahwa ada dinamika dan upaya daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan mendorong potensi ekonomi lokal melalui peningkatan PAD berupa kebijakan yang bersifat kontra produktif terhadap peningkatan investasi.

Ketertanggungfiskal berpengaruh signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 20,672 dengan  $P\text{-value } 0,000 < \alpha 5\%$ . Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) ketertanggungfiskal sebesar 2,286 menunjukkan H4 tidak didukung, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis empat yang menyatakan ketertanggungfiskal berpengaruh negatif terhadap PADS pemda. Dapat disimpulkan bahwa ketertanggungfiskal mampu mendiskriminasi perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara tetapi memiliki arah yang berbanding lurus. Ini berarti bahwa semakin tinggi ketertanggungfiskal, semakin tinggi PADS. Hasil ini menjelaskan bahwa hingga saat ini sumber pendanaan pemda kabupaten/kota di Maluku Utara yang berasal dari dana perimbangan pusat dan dana bagi hasil provinsi masih merupakan pos yang terbesar dan jumlah transfer yang diterima masing-masing daerah relatif berbeda. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah pusat selalu menjaga ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal agar tidak terjadi.

Hasil pengujian hipotesis empat dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Mentari (2012) yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan pemda kota Malang dapat dikatakan baik, meskipun hasil persentasenya masih berada dalam kategori kurang mampu. Hal ini lebih disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah desentralisasi di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer, sehingga penerimaan objek pajak di daerah yang sifatnya strategis sebagian besar masih dikuasai oleh pemerintah pusat.

Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 6,549 dengan  $P\text{-value } 0,014 < \alpha 5\%$ . Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) dana alokasi umum sebesar -4,672 menunjukkan H5 didukung, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) mampu mendiskriminasi perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara dan memiliki arah yang tidak berbanding lurus. Ini berarti bahwa semakin tinggi DAU, semakin rendah PADS. Hasil ini juga menjelaskan bahwa porsi DAU yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (*equalization grant*) masih yang terbesar sebagai sumber pendanaan pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara dan bervariasi tiap periodenya. Hal ini juga memberi informasi bahwa celah fiskal kabupaten/kota masih belum dapat ditutupi dengan potensi sumber daya yang ada di masing-masing daerah tersebut. Potensi sumber daya tersebut dapat dilihat dari besarnya kapasitas fiskal masing-masing daerah yang fluktuatif. Satu hal yang menjadi catatan adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Hasil pengujian hipotesis lima dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Mentari (2012), Ladjin (2008) yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan pemda dapat dikatakan baik, meskipun hasil persentasenya masih berada dalam kategori kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh DAU ditujukan untuk menjaga ketimpangan fiskal horizontal dan penggunaannya tidak dibatasi oleh pusat. Dari hasil penelitian ini terlihat sebuah pola yang mana terdapat pemda kabupaten/kota yang kaya (kemampuan keuangan tinggi) menerima DAU yang relatif kecil bila dibandingkan dengan daerah yang miskin (kemampuan keuangan rendah).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 4,468 dengan  $P\text{-value } 0,040 < \alpha 5\%$ . Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) pertumbuhan ekonomi sebesar 9,674 menunjukkan H6 didukung, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mendiskriminasi perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara. Ini berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, semakin tinggi PADS. Hasil ini juga menjelaskan bahwa apabila

nilai tambah barang dan jasa suatu daerah meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pula pada besarnya kontribusi PAD pemda yang bersangkutan. selain itu pertumbuhan ekonomi memiliki daya tarik bagi para investor dan calon investor dalam menilai potensi daerah untuk keamanan investasinya.

Hasil pengujian hipotesis enam dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Kurnia dan Candra (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah inti paling tinggi dan relatif stabil sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru (DOB) rendah dan cenderung fluktuatif. Ini disebabkan oleh pergerakan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat akan selalu proposional dengan investasi sektor swasta dan belanja daerah masing-masing pemda.

Pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 7,040 dengan  $P\text{-value } 0,011 < \alpha 5\%$ . Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) pendapatan per kapita sebesar 0,382 menunjukkan H9 didukung, dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita mampu mendiskriminasi perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi PADS pemda tersebut. Hal ini bermakna bahwa apabila standar kehidupan masyarakat menyangkut kesejahteraan di daerah meningkat maka secara tidak langsung akan mendorong kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Hasil pengujian hipotesis tujuh dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Kurnia dan Candra (2013) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita yang tinggi terjadi di daerah inti dan terendah di daerah otonom baru (DOB). Hal ini berarti bahwa perkembangan dan perubahan struktur ekonomi masyarakat cenderung terjadi di daerah kabupaten/kota induk, diakibatkan perbedaan ketersediaan infrastruktur antara daerah induk dan DOB.

Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 7,292 dengan  $P\text{-value } 0,010 < \alpha 5\%$ . Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) kemiskinan sebesar -2,213 menunjukkan H8 didukung, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mampu mendiskriminasi perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku

Utara. Hal ini menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat kemiskinan suatu daerah, semakin tinggi PADS pemda yang bersangkutan begitupun sebaliknya. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila standar kehidupan masyarakat menyangkut kesejahteraan terus di perbaiki dan meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun berimplikasi baik secara langsung maupun tak langsung akan mendorong kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang dapat meningkatkan PAD.

Hasil pengujian hipotesis delapan dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Arianti dan Cahyadinata (2013) yang menyatakan bahwa kemiskinan paling rendah terdapat di daerah inti dan yang tertinggi di DOB. Hal ini berarti bahwa daerah induk memiliki kinerja keuangan yang lebih baik oleh karena kesiapan daerah induk dari segi prasarana dan sarana publik serta beberapa investasi telah dilakukan daerah induk bersama sektor swasta guna menjamin ketersediaan lapangan kerja/usaha bagi warga masyarakatnya.

Pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap PADS pemda, hasil ini dapat dilihat dari F hitung sebesar 26,561 dengan  $P\text{-value } 0,000 < \alpha 5\%$ . Nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) pembangunan manusia sebesar 18,282 menunjukkan H9 didukung, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia mampu mendiskriminasi perbedaan PADS pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pembangunan manusia suatu daerah, semakin tinggi PADS pemda tersebut dan sebaliknya. Hal ini mempunyai makna jika kualitas hidup masyarakat (kreatifitas dan inovasi) meningkat, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dan bahkan relatif meningkat, berimplikasi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan daerah memenuhi seluruh hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hasil pengujian hipotesis sembilan dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Pratiwi (2016) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti bahwa investasi yang dilakukan pemda khususnya pada peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia akan menimbulkan efek *multiplier* yang positif bagi

tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagi kondisi kesehatan keuangan pemda itu sendiri terutama melalui kontribusi PADnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa analisis diskriminan dalam mengklasifikasikan tingkat kesehatan keuangan pemda kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara dengan kategori sehat dan tidak sehat dipengaruhi signifikan oleh tujuh variabel independen antara lain: desentralisasi fiskal (DOF), ketergantungan fiskal (Kf), dana alokasi umum (RDAU), pertumbuhan ekonomi (Pe), pendapatan per kapita (WELFI), kemiskinan (POVEI), dan pembangunan manusia (IPM). Di samping itu, ketepatan klasifikasi aktual group terhadap prediksi group secara keseluruhan adalah sebesar 87,5%. terdapat 4 kesalahan mengklasifikasikan pemda sehat, dan 2 kesalahan mengklasifikasikan pemda tidak sehat. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1) Berdasar nilai korelasi kanonikal ( $CR^2$ ) dari model yang di uji dalam penelitian ini sebesar 63,3%, maka ada 36,7% variabel penjelas lain yang belum teridentifikasi; 2) Kategori variabel dependen tingkat kesehatan keuangan pemda dalam penelitian ini dibagi masih secara ekstrim yaitu antara sehat dan tidak sehat; dan 3) Sampel penelitian yang digunakan masih sebatas kabupaten/kota pada satu provinsi, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini masih belum dapat digeneralisasikan.

### Saran

Saran penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan keuangan pemda. Terlebih menjaga keseimbangan antara variabel finansial dan non finansial, dapat menambah kategori variabel dependen menjadi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, dan dapat menambah luasan sampel kabupaten/kota secara nasional guna memperoleh model prediksi yang lebih akurat mengenai tingkat kesehatan keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2015. *Kebijakan Fiskal Merespon Ketidakpastian Global – Seri Analisis Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badrudin, Rudy. 2011. Pengaruh Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 22(1): 39-66.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Edisi 1, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ghozali, Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete*, Edisi 8, Cetakan VIII, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance Theory and Practice*. Singapore: Mc-Graw-Hill Book Co.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Pratiwi, Nurna. 2016. Pengaruh karakteristik pemda terhadap kemandirian keuangan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia, *Tesis*. Program Pascasarjana S-2 STIE YKPN

Yogyakarta.

Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: Murai Kencana PT. Radja Grafindo Persada.

Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali), *Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Waluyo, Joko. 2007. Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Democratic Governance”, A Paper Prepared for USAID Conference on Economics Growth and Democratic Governance, Washington: 4-20, <http://www.usaid.co.id>, diakses tanggal 16 Oktober 2016.